

GENDER MAINSTREAMING DALAM KURIKULUM MATA KULIAH AGAMA ISLAM DI PTN & PTS DI YOGYAKARTA

*M. Alfatih Suryadilaga, M. Yusuf & Ahmad Rafiq**

Abstract

Equality for women is a fundamental problem in education. There is, in fact, a gap between women and men. The Department of National Education of Indonesia, therefore, makes an effort to decrease the gap through what so-call gender mainstreaming. This article is to investigate gender mainstreaming program in higher educational Institutions, particularly in Yogyakarta. To have an adequate picture of gender mainstreaming program, UGM and UNY are selected to represent the state higher educational Institutions, while UII and UPN are as the sample of the private ones. The subject matter of Islamic religion is elected due to its contents that still include gender bias. The reality indicates that the available curriculum of Islamic religion in both State Islamic Higher Education and Private Higher education is not inclusive gender yet, in terms of contents, illustrations or sentences used to explain the contents. The model of learning and teaching, more over, is also still not responsive gender, particularly because the teachers or lecturers who deliver the subject have no gender perspective or sensitivity, although they have deep understanding of Islamic spirit that promotes gender equality.

Kata Kunci: Gender Mainstreaming, Kurikulum, Mata Kuliah Agama Islam, PTN, UGM, UNY, PTS, UII, UPN .

I. Pendahuluan

Ketika pendidikan bukan hanya dianggap atau dinyatakan sebagai sebuah unsur utama dalam upaya pencerdasan bangsa melainkan juga

* Dosen Jurusan Tafsir & Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

sebagai produk atau konstruksi sosial, maka pendidikan juga memiliki andil bagi terbentuknya relasi gender di masyarakat.¹ Kondisi demikian timbul dikarenakan telah terjadi banyak ketimpangan gender di masyarakat yang diasumsikan muncul karena terdapat bias gender dalam pendidikan termasuk pendidikan agama Islam.²

Kurikulum merupakan salah satu hal yang penting bagi sebuah Perguruan Tinggi karena dengan kurikulum tersebut dapat dijadikan tolok ukur seberapa jauh keinginan pasar atas dunia akademik.³ Sejak diberlakukannya sistem SKS, kurikulum yang diberlakukan di Perguruan Tinggi bermacam-macam dan terakhir adalah KBK (kurikulum berbasis kompetensi) pada tahun 2003. Adanya keinginan untuk memberdayakan perempuan, merupakan suatu alasan di mana pengarusutamaan gender dimasukkan ke dalam kurikulum. Perempuan dalam bidang pendidikan

¹ Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999–2004 mengakui secara gamblang bahwa status dan peranan perempuan dalam masyarakat Indonesia dewasa ini masih bersifat subordinatif dan belum sampai pada posisi sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Dengan demikian negara mengakui akan adanya ketimpangan gender tersebut. Indikator dari ketimpangan gender ini tercermin pada tingkat kualitas hidup perempuan Indonesia yang menduduki peringkat paling rendah di ASEAN. Lihat Musdah Mulia (ed.), *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama, Departemen Agama, 2001), 108.

² Pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktifitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat. Omar Mohammad Al-Thoumi al-Syaibani, *Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1979), 399.

³ Rendahnya kualitas hidup perempuan Indonesia terlihat pada beberapa aspek di antaranya adalah pada aspek pendidikan. Fakta menunjukkan rendahnya angka partisipasi perempuan di jenjang pendidikan tinggi, yakni kurang dari 5%. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat disparitas (ketidakseimbangan) gendernya. Data lainnya adalah angka buta huruf di kalangan perempuan masih sangat tinggi: kurikulum serta materi bahan ajar masih sangat bias gender; dan hampir seluruh proses pengelolaan pendidikan masih dirumuskan berdasarkan pandangan yang male bias sebagai akibat dari masih dipegangnya sebagian besar penentu kebijakan pendidikan oleh laki-laki. Tim KKG PAI, *Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan Agama Islam untuk SD kelas 4*, (Jakarta ; Ghalia Indonesia, 2002), 125.

masih tersisihkan. Banyak di antara mereka belum mengakses dengan baik.⁴

Untuk melihat keberadaan *Gender Mainsreaming* di Perguruan Tinggi maka diambil sampel dari dua Perguruan Tinggi Negeri dan dua Perguruan Tinggi Swasta. Masing-masing perguruan tinggi diwakili dua program studi dari ilmu eksak dan ilmu sosial. Selain itu, juga mempertimbangkan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar agama Islam, dosen dan mahasiswa serta pemegang kebijakan kurikulum. Dari dua disiplin keilmuan yang berbeda ini diharapkan akan memperkaya pemahaman Pengarusutamaan Gender di Perguruan Tinggi.⁵

Karena itulah, persoalan ini menjadi hadir di depan pembaca untuk membahas persoalan pembelajaran mata kuliah agama Islam yang ada di PTN dan PTS yang ada di Yogyakarta terkait dengan aplikasi pemahaman *Gender Mainstreaming*. Selain itu pula juga akan dibahas mengenai kebijakan pemegang kurikulum yang ada di PTN dan PTS serta diungkap juga terkait dengan gerak polah dosen pengampu materi agama Islam dalam memahami dan mentrasformasikan wacana serta aplikasi *Gender Mainstreaming* dalam pembelajaran mata kuliah agama Islam.

II. Aplikasi *Gender Mainstreaming* & Pembelajaran Matakuliah Agama Islam di PTN & PTS Yogyakarta

Meskipun pemerintah dalam hal ini Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sudah sangat banyak mengeluarkan tenaga, waktu, dan dana untuk program pengarusutamaan gender, namun kemampuan

⁴ Penduduk wanita yang jumlahnya 49.9% (102.847.415) dari total (206.264.595) penduduk Indonesia (Sensus Penduduk 2000) merupakan sumberdaya pembangunan yang cukup besar. Partisipasi aktif wanita dalam setiap proses pembangunan akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Kurang berperannya kaum perempuan, akan memperlambat proses pembangunan atau bahkan perempuan dapat menjadi beban pembangunan itu sendiri.

⁵ Pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) menjadi tema sentral dalam setiap kajian dan seminar. Hal ini menunjukkan bahwa *discourse* mengenai gender sampai detik ini masih merupakan “pekerjaan rumah” yang belum terselesaikan secara tuntas dan komprehensif. Baik dalam aspek pemahaman, maupun aplikasi di lapangan.

bahkan pemahaman kaum perempuan terhadap isi semangat ajaran Islam khususnya para mahasiswi yang ada di PTN dan PTS di Yogyakarta, masih sangat terbatas. Adanya ketimpangan struktural dan kultural mahasiswa perempuan⁶ di dalam memahami spirit ajaran Islam yang ada pada mata kuliah agama tidak banyak disadari oleh dosen, pengambil kebijakan, perencana dan pelaksana civitas akademik.

Kasus yang demikian, karena itu, menjadi fokus kajian dalam tulisan ini. Sekian observasi yang telah dilakukan di PTN dan PTS di Yogyakarta terkait dengan aplikasi pemahaman *gender mainstreaming* yang ada pada pembelajaran mata kuliah agama Islam, memang terkesan memiliki model pembelajaran yang cukup bervariasi. Setiap pengajar (dosen) memiliki trik dan sistem pembelajaran yang cukup berlainan khususnya dalam pembelajaran mata kuliah agama Islam baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang ada di Yogyakarta.

Meskipun demikian, jarang bahkan sedikit dari kesemua model pembelajaran mata kuliah agama Islam yang ada di PTN dan PTS di Yogyakarta yang berani memberikan pemahaman berbeda terhadap materi agama Islam yang sudah jelas cenderung bias gender dan tidak selaras dengan ajaran.

Artinya, tidak ada di antara pengajar mata kuliah agama Islam yang berani memberikan tafsir (uraian) baru terhadap redaksi sumber ajaran Islam (al-Qur'an maupun hadis) yang terkesan bias gender. Meskipun redaksi sumber ajaran Islam jika dipahami terkesan bias gender, namun tetap saja dalam pengajarannya disampaikan apa adanya meskipun sudah jelas terasa bias gender.

Itulah mengapa, cara atau model transformasi keilmuan sumber ajaran agama Islam yang ada pada PTN dan PTS di Yogyakarta ditemukan masih saja menguraikan statemen bahwa apa yang tertulis dalam sumber

⁶ Faktor penyebab kesenjangan gender pada aspek selain di pendidikan, misalnya di politik sebagai berikut: hasil Pemilu tahun 1999 yang menyertakan 57% pemilih perempuan hanya terwakili 8,8% dari seluruh anggota DPR, lebih rendah dari hasil pemilu 1997 yang berjumlah 11,2% dari jumlah pemilih 51%, (Sumber: Statistik dan Indikator Gender Indonesia 2002). Pemilu 2004 perempuan hanya terwakili 11%.

ajaran Islam (baca; al-Qur'an dan hadis) sudah cukup benar dan jelas. Karena itu, menurut beberapa responden, memberikan tafsir baru atau paling tidak menguraikan maksud redaksi sumber ajaran Islam dengan menjelaskan uraian tambahan, sudah semestinya tidak perlu karena sumber ajaran tersebut sudah jelas dan benar (*valid, red*).⁷

Ide gagasan tersebut yang pada gilirannya memberikan pemahaman bahwa redaksi sumber ajaran Islam selama ini dikira bias gender, tidak perlu dikomentari karena apa yang dikira merupakan perkiraan yang 'tidak benar' bagi mereka. Artinya, meskipun redaksi sumber ajaran Islam mencerminkan atau paling tidak terkesan bias gender, namun dalam memberikan pemahaman terhadap mahasiswa/wi harus tetap sebagaimana apa yang tertulis dalam redaksi sumber ajaran Islam.

Ajaran Islam yang tertuang pada al-Qur'an dan hadis, menurut mereka (para dosen matakuliah agama Islam yang ada di PTN dan PTS di Yogyakarta), sudah jelas benar dan cukup valid sehingga memberikan tafsir atas redaksi yang bias gender akan memberikan dampak tidak benar. Karena itu, penafsiran 'tambahan' yang melenceng dari gagasan sumber ajaran Islam sudah semestinya tidak dilakukan oleh pengkaji Islam termasuk dosen matakuliah agama Islam.⁸

Bias gender dalam sumber ajaran Islam, bagi mereka, tidak pernah terjadi. Kalaupun ada, itu karena hakikat produk perempuan memang seperti itu. Selama ini sumber ajaran Islam tidak mengenal bias gender. Islam yang tumbuh di muka bumi termasuk dengan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber rujukannya, tidak mengenal bias gender. Karena gender, menurut sebagian responden, adalah produk pemikiran Barat, padahal

⁷ Data diambil dari pengolahan hasil observasi dan wawancara dengan responden pada bulan September - Oktober 2007. Di antara mereka yang diwawancarai adalah dosen mata kuliah agama Islam kampus UII Yogyakarta.

⁸ *Ibid.*,

Islam berbeda dengan Barat. Islam yang berasal dari daerah Timur, tentunya tidak mengenal gender.⁹

Itulah mengapa pemahaman yang demikian, pada gilirannya telah memberikan pemahaman terhadap ajaran agama Islam menjadi bertamabah bias gender. Artinya, dengan model penafsiran yang terkesan tekstualis (apa adanya, *red*), kesempatan kaum perempuan untuk menikmati pemahaman pendidikan ajaran agama terasa “disunat” bahkan banyak di antara mereka yang mendapatkan perlakuan psikologi menyedihkan terkait dengan cita-cita belajar.

Seperti contoh di dalam memahami ajaran agama tentang perempuan adalah tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok, perempuan adalah fitnah, kurang akal dan kurang agama, perempuan adalah penghuni neraka terbanyak, perempuan tidak layak menjadi pemimpin, perempuan tidak sah mengawinkan dirinya atau orang lain, perempuan tidak sah menjadi saksi pernikahan, perempuan tidak boleh bepergian kecuali dengan kerabat, perempuan harus tunduk pada aturan suami, bahkan ada teks yang menyatakan bahwa perempuan adalah sumber kesialan, telah menjadi pemahaman biasa bahkan sudah terbiasa di kalangan kaum perempuan.

⁹ Hal ini berbeda dengan beberapa pikiran atau ide analisa terkait mengenai gender bahwa gender seperti menurut Hilary M. Lips dalam bukunya *Sex and Gender: An Introduction*, mengungkapkan bahwa gender diartikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectation for women and men*). Lihat, Hilary M. Lips, *Sex and Gender: An Introduction*, (California: Mayfield Publishing Company, 2001), 4. Pendapat ini menurut Nasaruddin sejalan dengan pendapat kaum feminis. Elaine Shorwalter mengartikan gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, lihat. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta: Paramadina, 2001, 34). Nasaruddin Umar menekankan sebagai konsep analisis (*an analitic concept*) yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. H.T Wilson, seorang pengamat Gender, mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Karena itu Nasaruddin Umar mengatakan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya; suatu bentuk rekayasa masyarakat (*sosial constructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Lihat Linda Brannon, *Gender: Psychological Perspective*, (Boston: Allyn and Bacon, 1999), 12-13.

Pemaknaan terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadis yang seharusnya penting untuk dikaji ulang, bahkan sebagian di antaranya harus ditolak karena sanadnya lemah, atau karena maknanya bertentangan dengan ayat al-Qur'an, atau dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya, menjadi tidak perlu dilakukan (dikaji ulang, *red*) karena menurut sebagian responden bahwa redaksi yang demikian meskipun terkesan bias gender, sebetulnya bukan bias gender dan karena itu memahaminya juga harus sebagaimana yang tertulis.¹⁰ Yaitu memahami sebagaimana yang diinginkan redaksi yang tertulis.

Fenomena pemahaman yang demikian, berbeda dengan sebagian responden lainnya yang mengamini bahwa dalam sumber Islam penuh dan syarat akan bias gender. Ini disebabkan karena redaksi al-Qur'an—menurut responden lainnya—diturunkan dalam budaya masyarakat yang sangat bias gender, yaitu budaya di mana dominasi laki-laki sangat kuat. Karena itu tak bisa dipungkiri bias gender akan senantiasa ada dalam uraian-uraian sumber ajaran agama Islam.

Bagi responden yang sepakat dengan pemahaman yang kedua tersebut, memberikan penegasan bahwa memberikan tafsir baru atau minimal memberikan uraian pemahaman baru atas redaksi sumber ajaran Islam yang terkesan bias gender sangat perlu bahkan penting untuk segera dilakukan karena menurut mereka spirit ajaran Islam tidak pernah menginginkan adanya ketidakadilan termasuk di dalamnya bias gender yang terkesan mengerdilkan bahkan memberikan ajaran ketidakadilan bagi kaum perempuan.

Apalagi pemberian uraian atau memberikan tafsir atas ajaran Islam yang terkesan bias gender tersebut dipakai dan digunakan untuk mendidik anak bangsa, maka menjadi sangat perlu bahkan mendesak untuk segera dilakukan agar mereka terlatih berpikir adil dan seimbang akan kebenaran spirit Islam yang sebenarnya tidak menginginkan adanya ketidakadilan sebagaimana hal itu telah menimpa pada kaum perempuan. Kurikulum

¹⁰ Data diambil dari pengolahan hasil observasi dan wawancara dengan responden pada bulan September - Oktober 2007. Wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah agama Islam kampus UII Yogyakarta.

bahan ajar agama Islam yang digunakan dalam pembelajaran di PTN dan PTS di Yogyakarta, menurut sebagian responden, memang sangat bias gender.¹¹

Hal itu terlihat pada materi pembelajaran mata kuliah seperti; jarangny bahan ajar yang mengemukakan teori atau pendapat yang proporsional dan peka gender dari akademisi, ahli atau tokoh-tokoh yang tidak hanya laki-laki namun juga perempuan. Dalam pembelajaran, misalnya, jarang dikemukakan teori atau pendapat dari mufassir perempuan yang selama ini banyak tidak dikenal di kalangan mahasiswa dan mahasiswi PTN seperti UGM maupun UNY atau PTS seperti UPN maupun UII. Atau juga, misalnya, jarang dimasukkan tema-tema kesetaraan gender ke dalam materi-materi pembelajaran.¹²

Menurut sebagian responden yang sepakat dengan gagasan yang kedua tersebut, tentunya pemberian materi agama Islam yang sadar gender wajib dijelaskan kepada seluruh mahasiswa. Salah satu sebab menjadi wajib karena materi agama Islam selain berada pada tahun-tahun pertama atau dengan bahasa lain berada pada semester-semester awal, di sisi lain materi tersebut merupakan materi MKDU (matakuliah dasar umum) yang menjadi bekal fondasi bagi pemahaman terhadap agama Islam bagi seluruh mahasiswa/wi di PTN dan PTS.

Itulah mengapa pemahaman awal atau paling tidak pemahaman lanjutan dari pemahaman semasa sekolah di SMA/Aliyah mengenai spirit ajaran Islam, menjadi sangat penting untuk segera dijelaskan sebagai pendalaman dari materi pemahaman agama Islam. Menjelaskan, tentu, minimal memberi tafsir baru atau paling tidak memberikan tafsiran atas adanya ketidakadilan yang selama ini tidak disadari telah menimpa kaum perempuan, menjadi hal penting yang segera bisa diperoleh oleh mahasiswa baru sebagai generasi bangsa.

Karena itu, aplikasi pemahaman *gender mainstreaming* dalam pembelajaran matakuliah agama Islam di PTN & PTS di Yogyakarta terkesan

¹¹ *Ibid.*, Observasi

¹² *Ibid.*, Observasi dan wawancara dengan beberapa dosen mata kuliah agama Islam yang ada di UPN dan UGM.

tergantung pada dosen agama yang memang mengerti betul dan memahami benar akan pentingnya pengarusutamaan gender.¹³ Ini menjadi lain persoalannya ketika dosen agama belum peka atau belum sadar akan pentingnya cerdas gender, maka tentu saja aplikasi pemahaman *gender mainstreaming* tidak bakalan ada atau susah ditemukan.

Oleh sebab itulah, aplikasi *gender mainstreaming* dalam kurikulum agama Islam di PTN dan PTS di Yogyakarta ditemukan mempunyai dua wujud yang berbeda yaitu *pertama*; bahwa pemahaman *gender mainstreaming* akan bisa ditemukan ketika pengajar atau dosen menyadari akan pentingnya keadilan gender dan yang kedua yaitu sebaliknya tidak akan bisa ditemui atau bahkan sulit didapati adanya aplikasi *gender mainstreaming* pada matakuliah agama ketika pengajar atau dosen belum menyadari akan efek negatifnya ketidakadilan gender.¹⁴

Dalam upaya mewujudkan pemahaman keagamaan yang bersifat gender, menurut sebagian responden, sudah selayaknya diperlukan revisi terhadap hal-hal yang bias gender dalam buku ajar Agama Islam tersebut. Revisi ini menjadi penting dikarenakan pemahaman keagamaan yang bias ini justru menjadi pemahaman mayoritas di masyarakat umum. Kenyataan ini dilatar belakangi karena umat Islam memahami ajaran agamanya secara dogmatis dan bukan berdasarkan penalaran yang kritis khususnya pengetahuan agama yang menjelaskan peran dan kedudukan perempuan.

Perlu ditekankan pula penyadaran tentang nilai-nilai pendidikan yang berperspektif gender kepada semua pihak khususnya para pengarang dan editor buku tentang kenyataan bahwa kurikulum yang ada tidak netral gender artinya disusun dan dirumuskan dengan sudut pandang laki-laki sehingga mereka tidak lagi membuat gambar ataupun narasi bahan ajar agama yang bias gender. Sementara itu, bagi para dosen agama Islam yang ada di PTN maupun PTS dituntut untuk lebih kritis dan sensitif dalam menelaah dan mencermati segala hal yang terkait dengan

¹³ *Ibid.*, wawancara dengan salah satu dosen pengampu mata kuliah agama Islam kampus UPN Veteran Yogyakarta.

¹⁴ *Ibid.*

ketimpangan gender dalam proses pembelajaran yang berlangsung dalam kerja kesehariannya.

Itulah mengapa, tidak dapat diingkari bahwa banyak ketentuan hukum Islam yang membedakan norma hukum untuk laki-laki dan perempuan. Namun perbedaan tersebut tidak bersifat kodrati dengan mengacu pada faktor biologis manusia (jenis kelamin). Karenanya, seharusnya perbedaan yang kemudian dibakukan dalam beragam norma hukum dan sosial yang ada selama ini, menurut responden yang sepakat dengan gagasan kedua tersebut, lebih dipandang sebagai akibat dari upaya masing-masing individu manusia berdialektis dalam ‘proses menjadi’ atau bereksistensi, mewujudkan kehidupan relasi gender yang berkeadilan di hadapan Tuhan dalam kedudukannya sebagai khalifah Tuhan di bumi.

III. *Gender Mainstreaming* dalam Civitas Akademik & Model Pelayanan Kemahasiswaan

Sekian observasi yang dilakukan di beberapa civitas akademik yang ada di PTN dan PTS di Yogyakarta, tidak ditemukan dasar filosofi akan adanya diskriminasi terhadap mahasiswa perempuan. Dasar pelayanan yang ada dan yang diterapkan di PTN maupun PTS di Yogyakarta selama ini adalah dasar pelayanan yang berupaya memberikan pelayanan adil dan semaksimal mungkin baik untuk mahasiswa laki-laki maupun perempuan.¹⁵

Karena itu ketika pelayanan civitas akademik terlihat lebih memprioritaskan mahasiswa laki-laki misalnya, maka problem tersebut, menurut sebagian responden, bukan tertuju pada dasar-dasar pelayanan civitas akademik melainkan tertuju pada salah satu oknum civitas akademik yang bertindak menyeleweng dari prinsip dasar pelayanan akademik.

Civitas akademik baik yang ada di PTN maupun PTS di Yogyakarta, di dalam memberikan pelayanan akademik tidak ada unsur diskriminasi. Semua yang dilayani sepanjang masih mempunyai ikatan kontrak dengan

¹⁵ *Ibid.*, wawancara dengan beberapa staff pegawai kampus UGM dan UNY.

akademik, maka berhak kepadanya sebuah pelayanan yang baik. Pelayanan baik yang dimaksudkan di sini adalah pelayanan yang memberikan keadilan kepada mahasiswa perempuan maupun laki-laki. Tidak ada perbedaan apakah yang dilayani mahasiswa laki maupun perempuan, semua diberi hak yang sama karena mereka terikat dengan kewajiban yang sama.¹⁶

Sebagaimana data lapangan yang ditemukan, civitas akademik baik yang ada di PTN maupun PTS di Yogyakarta di dalam mengaplikasikan *gender mainstreaming* terwujud pada bentuk dan upaya yang sama-sama menyediakan akses sama bagi mahasiswa laki-laki maupun perempuan untuk berperan di dalam lingkungan civitas akademiknya seperti BEM, BEMJ, DEMA maupun institusi kemahasiswaan lainnya dengan adil dan seimbang. Civitas akademik tidak berperan untuk memprioritaskan salah satu mahasiswa berdasarkan *gender oriented*.¹⁷

Itulah mengapa dasar kuat yang dibangun meskipun sama-sama menyadari bahwa karakter kerja, kesempatan dan hambatan yang dimiliki perempuan tidak sama dengan laki-laki dalam menjalankan tugas, namun keduanya tetap saja keduanya memiliki hak dan kepentingan yang sama dalam menempati setiap posisi di dalamnya. Kondisi manajemen pelayanan ini terlihat dijalankan baik bagi PTN maupun PTS yang ada di Yogyakarta. Karena itu, tidak ada model pelayanan kemahasiswaan yang sifatnya memprioritaskan berdasarkan orientasi gender. Semua mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan diberlakukan sama karena mereka mempunyai hak dan tanggung jawab sama.

Karakter manajemen yang demikian, diharapkan mampu mendorong terwujudnya prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan sistem manajemen perguruan tinggi yang meliputi fungsi pengambilan kebijakan civitas akademik, pelaksanaan akademik, serta evaluasi dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan di semua pelayanan kampus. Karakter yang seperti itu berdasarkan dan berprinsip bahwa

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, wawancara dengan beberapa mahasiswa dan staff pegawai kampus PTN dan PTS di Yogyakarta.

perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kepentingan yang sama terhadap hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan dan akademis serta untuk ikut serta mengelola jalannya lembaga civitas akademik.

Bentuk dan model *Gender Mainstreaming* dalam civitas akademik yang ada di PTN dan PTS di Yogyakarta ini paling tidak terwujud pada pola-pola aplikasi sebagai berikut;¹⁸

“....a). Performa manajemen.

Terlihat cukup seimbangnnya wewenang untuk mengambil keputusan antara laki-laki dan perempuan, tidak adanya upaya dominasi laki-laki, serta terlihatnya sikap yang ramah terhadap perempuan, menjadi pemandangan sehari-hari yang menarik.

“...b). Keseimbangan Perempuan dan Laki-laki.

Kesamaan jumlah bukanlah tujuan yang sama, namun jumlah perempuan yang signifikan akan mendorong perhatian lebih besar kepada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan perempuan di universitas. Kondisi yang demikian terlihat pada bentuk manajemen aplikasi pelayanan yang ada di PTN dan PTS di Yogyakarta.

“...c). Budaya dan Gaya Manajerial

Adanya budaya dan gaya manajerial yang menghargai terhadap adanya perbedaan gaya dan cara kerja antara staf laki-laki dan perempuan dalam kegiatan akademik di PTN dan PTS di Yogyakarta terkesan menjadi hal yang biasa. Pegawai laki-laki dan perempuan yang bekerja di PTN dan PTS Yogyakarta mengakui akan adanya peluang untuk maju secara setara.”¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, Observasi.

¹⁹ *Ibid.*

Bentuk manajerial yang demikian, tentunya terlihat lebih bisa mengarah atau mengfokus pada inti pendidikan yang memang sebetulnya merupakan hak asasi manusia dan menjadi alat yang sangat penting untuk mencapai model kesetaraan, pengembangan, dan kedamaian. Model pola manajemen pendidikan yang tidak diskriminatif akan bermanfaat bagi perempuan maupun laki-laki, terutama untuk menyetarakan hubungan di antara keduanya. Untuk menjadi agen perubahan, mahasiswa perempuan misalkan, harus memiliki akses yang adil terhadap kesempatan pendidikan.

Melek huruf bagi perempuan merupakan kunci untuk meningkatkan kesehatan, gizi, dan pendidikan, dan untuk memberdayakan perempuan agar bisa berpartisipasi penuh dalam pembuatan keputusan dalam masyarakat. Dengan tingkat pengembalian (*return*) yang sangat tinggi, investasi dalam pendidikan formal dan informal serta pelatihan-pelatihan untuk anak perempuan maupun perempuan dewasa telah terbukti menjadi salah satu sarana terbaik untuk mencapai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, tak terlihat di beberapa institusi PTN dan PTS di Yogyakarta terhadap kesadaran akan cerdas gender dijadikan sebagai misi dan visi Universitas yang dijadikan sebagai salah satu target dalam kebijakan-kebijakan Universitas. Selain tidak ditemukan adanya manajemen struktur Universitas terkait dengan dijaminnya mahasiswa laki-laki dan perempuan akan adanya kesempatan dan akses yang sama dalam menentukan keputusan-keputusan Universitas, ketidakseimbangan antara struktural kepemimpinan juga didapati pada pola manajerial dari atasan sampai bawah atau dari universitas, fakultas dan jurusan meskipun sedikit.

Itulah mengapa, komposisi antara laki-laki dan perempuan yang mengisi kelompok-kelompok jabatan di Universitas yang ada di PTN dan PTS juga bisa dijadikan patokan dasar atas berlangsungnya *Gender Mainstreaming* dalam civitas akademik. Artinya, perimbangan komposisi antara laki-laki dan perempuan dalam setiap tingkat struktur jabatan merupakan prasyarat yang sangat penting untuk bisa dijadikan penilaian

apakah pengarustamaan gender yang ada di civitas akademik diberlakukan atau tidak.

Meskipun demikian, perimbangan komposisi yang juga mencakup kompetensi antara staf atau pengurus laki-laki dan perempuan tidak menjadi musabab utama karena tidak hanya perimbangan jumlah atau kuantitas dari laki-laki dan perempuan melainkan juga perimbangan kualitas antara keduanya. Dan dari sekian penganalisaan data observasi yang ada, civitas akademik PTN dan PTS yang ada di Yogyakarta belum bisa dikatakan sudah 100% mengaplikasikan program *Gender Mainstreaming* meskipun terlihat sudah ada *greget* atau upaya untuk melakukan hal itu.

IV. *Gender Mainstreaming* dalam Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam di PTN & PTS Yogyakarta

Jika ditelusuri keberlangsungan keterpurukkan perempuan salah satunya adalah dilatarbelakangi oleh “kekurangarifan” dalam menafsirkan dalil-dalil agama Islam yang kemudian seringkali dijadikan dasar untuk menolak kesetaraan gender. Kitab-kitab tafsir dijadikan referensi untuk melegitimasi paradigma patriarki, yang memberikan hak-hak istimewa kepada laki-laki dan cenderung memojokkan perempuan dengan pen- definisian yang negatif.

Pendefinisian sosok perempuan yang negatif ini kemudian diwariskan secara turun temurun yang pada akhirnya mengendap dalam alam bawah sadar perempuan yang menimbulkan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam hubungannya sebagai hamba Tuhan. Dengan kata lain pemahaman akan posisi perempuan yang bias gender sudah dengan sendirinya tertradisikan di masyarakat yang dibakukan oleh konstruksi budaya dan doktrin keagamaan serta ditopang oleh nilai-nilai kultural dan ideologis. Hal ini pada gilirannya menjadi acuan bagi penulisan buku-buku dan bahan ajar pendidikan agama Islam.

Menurut Mohammad Yasir Alimi, ketidakadilan dan diskriminasi perempuan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor budaya dan hukum.

Dalam masyarakat terdapat budaya yang cenderung *male chauvinistic*, di mana kaum laki-laki menganggap diri dan dianggap sebagai makhluk yang kuat dan superior. Budaya *male chauvinistic* itu diperkokoh dengan ideologi misoginis (sikap benci kepada perempuan) dan ideologi patriarki.

Dalam isi hukum, budaya hukum dan proses pembuatan serta penegakkannya yang dibuat negara, seringkali diskriminatif terhadap perempuan. Itu karena pembuat hukum seringkali tidak respon terhadap kebutuhan masing-masing jenis kelamin (*gender blind*) dan tidak memahami kebutuhan spesifik perempuan. Itulah mengapa sekian observasi yang telah dilakukan di PTN dan PTS yang ada di Yogyakarta, tiada lain adalah untuk memahami sejauhmana pemahaman bahan ajar agama Islam memiliki upaya-upaya sadar gender.

Tentunya, hasil yang diperoleh di sini memiliki ragam pembacaan yang berbeda. Terdapat beberapa bagian yang bias gender dalam kurikulum agama Islam di antaranya berada pada materi aqidah-akhlak dan fiqh-ibadah. Sebagai contoh dalam buku ajar agama Islam untuk PTN dan PTS tentang keimanan kepada kepada Rasul-rasul Allah; dijelaskan bahwa 'pengertian Rasul ialah seorang manusia biasa (laki-laki) yang menerima wahyu dari Allah Swt. untuk dirinya sendiri. Rasul ialah seorang manusia biasa (laki-laki) yang diutus oleh Allah dan menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya".

Selain itu, dalam buku-buku ajar agama Islam PTN dan PTS di Yogyakarta, menurut sebagian responden menjelaskan, sering didengar dalam penjelasannya mengenai cerita-cerita kesalehan/ keagamaan yang dalam cerita tersebut sang tokoh sering didominasi oleh kaum laki-laki. Yang dikisahkan lebih banyak pada gambaran ketokohan dan ketauladanan seorang laki-laki dibandingkan perempuan. Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang dapat menjadi Nabi dan Rasul hanyalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan perempuan tidak dapat menjadi seorang Nabi dan Rasul.

Bias Gender yang lain dalam buku ajar Agama Islam juga terdapat dalam beberapa kalimat tentang tema-tema seperti wudlu', dan shalat berjama'ah (fiqih) mayoritas uraian yang disebutkan adalah bahwa yang

berhak menjadi imam shalat adalah laki-laki. Penguraian ini bagi peneliti juga bernuasa bias gender karena kewajiban pelaksanaan dan praktek ibadah (fiqih), khususnya menjadi imam, tidak hanya dibebankan kepada laki-laki tetapi juga bagi perempuan.

Persoalan bias gender kedua dalam masalah fiqih, yang lain adalah tentang shalat jama'ah, munakahat, udhiyah dan mawarits. Dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam di PTN dan PTS di Yogyakarta tentang shalat jama'ah misalkan, dijelaskan bahwa ketentuan menjadi imam, yaitu:

“.....(a). laki-laki mengimami laki-laki; (b). laki-laki mengimami perempuan; (c). perempuan mengimami perempuan; (d). laki-laki mengimami banci; (e). banci mengimami perempuan. Dalam pembelajaran bahan ajar lainnya, dijelaskan bahwa syarat-syarat menjadi imam, yaitu; (a). sehat akalnya; (b). harus baik dan benar bacaannya; (c). harus laki-laki (tidak boleh perempuan menjadi imam laki-laki; (d). lebih tua umurnya; (f). hendaknya memiliki pengetahuan yang memadai, khususnya tentang shalat berjama'ah”.²⁰

Dari pembelajaran mengenai pendidikan agama Islam khususnya dalam bidang ibadah, dapat dipahami bahwa perempuan tidak dapat menjadi imam bagi laki-laki dengan dipertegas salah satu syarat untuk menjadi imam adalah harus laki-laki (tidak boleh perempuan menjadi imam). Dari pembelajaran tersebut, bisa juga diusulkan sebuah pertanyaan, “mengapa perempuan tidak boleh mengimami laki-laki?”, “bagaimana jika yang menjadi makmum adalah laki-laki yang masih kanak-kanak?”, “atau bolehkah perempuan mengimami laki-laki karena bacaan shalatnya lebih fasih dan ‘alim dibandingkan laki-laki yang menjadi makmum?”.

Atau juga bias gender diketemukan tatkala salah satu mahasiswa bertanya tentang persoalan tradisi udhiyah (penyembelihan). Dalam jawaban seorang dosen ditegaskan bahwa “aqiqah untuk anak laki-laki adalah dua ekor kambing dan anak perempuan sebanyak satu ekor kambing”. Dari perbincangan mengenai penjelasan tentang udhiyah

²⁰ *Ibid.*

tersebut, dapat dipahami bahwa adanya diskriminasi terhadap anak, yaitu harga anak laki-laki dua kali lipat harga anak perempuan.

Sama halnya penjelasan seorang dosen terhadap pertanyaan salah satu mahasiswanya tentang harta benda warisan dari keluarga yang sudah ditinggal mati. Ditemukan penjelasan dari dosen tersebut bahwa “bagian satu anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian satu anak perempuan. Penjelasan yang demikian menurut alasan dosen pengajar mata kuliah agama Islam adalah bersumber dari dan berdasarkan pada surah an-Nisa ayat 11 bahwa “Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan”.

Itulah mengapa, terlihat di sana masih banyak bias gender yang mudah didapati yaitu selain pada bahan ajar agama Islam, model pengajaran beberapa dosen mata kuliah agama Islam juga masih ada yang sangat bias gender. Karena itu, tentunya pengarustamaan gender atau *gender mainstreaming* yang ada pada PTN dan PTS di Yogyakarta belum terlihat ada atau sekalipun ada tentu hal itu hanya terhitung pada pola pengajaran yang diampu oleh mereka yang paham akan pola pemahaman struktural orintasi gender.

Meskipun demikian, tidak bisa dinafikan bahwa *gender mainstreaming* yang ada pada bahan ajar mata kuliah agama Islam yang ada di PTS dan PTN Yogyakarta mengalami atau mendapati prediksi penilaian tidak bias gender. Masih banyak bahan-bahan ajar atau bahkan pola pengajaran mata kuliah lainnya yang sangat bias gender selain dari matakuliah agama Islam. Salah satu sebab dari masih adanya bias gender yang ada pada bahan ajar di mata kuliah agama Islam adalah adanya ketidak beranian dari seorang pengampu bahan ajar mata kuliah untuk memberikan penjelasan baru terkait dengan teks keagamaan.²¹

Sekalipun beberapa dosen mata kuliah agama memahami spirit ajaran Islam yang sangat memperhatikan akan keadilan termasuk juga keadilan gender, namun dalam aplikasi konkrit pembelajaran bahan ajar mata kuliah agama Islam yang ada di PTN dan PTS di Yogyakarta masih

²¹ *Ibid.*

didapati keterangan dan penjelasan materi yang bias gender.²² Tentu ketidakberanian tersebut, perlu menjadi bahan perenungan bersama bagi tiap-tiap PTN dan PTS yang ada.²³

V. Kesimpulan

Setelah melihat beberapa instrumen data yang ada, kemudian dianalisa untuk mencari jawaban dari fokus persoalan yang dikaji, ditemukan beberapa jawaban singkat sebagai berikut;

1. Model pembelajaran matakuliah agama Islam yang ada di masing-masing PTN dan PTS di Yogyakarta memiliki dua model variasi. *Pertama* adalah model pembelajaran bias gender sepanjang mata kuliah masih dipegang oleh pengajar yang belum sadar gender. *Kedua* adalah model pembelajaran yang sudah menerapkan *Gender Mainstreaming* karena mata kuliah agama Islam dipegang oleh pengajar yang sudah sadar gender.
2. Aplikasi *Gender Mainstreaming* di civitas akademik, didapati belum kesemuanya tersentuh oleh penerapan *Gender Mainstreaming* secara komplit meskipun dalam sebagian aplikasinya sudah ada upaya untuk meletakkan model dasar manajemen pelayanan adil dan sadar gender baik untuk mahasiswa laki-laki maupun perempuan.

²² *Ibid.*, wawancara dengan beberapa mahasiswa UPN dan UGM.

²³ Di dalam proses pendidikan itu sendiri ternyata selama ini telah dimasuki pewarisan ketimpangan gender, tetapi para praktisi pendidikan tidak pernah memahaminya sebagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani. Tidak sedikit praktisi pendidikan yang menanggapi persoalan ini dengan dingin, hingga akhirnya pendidikan lebih memainkan fungsinya sebagai agen sosialisasi ketimpangan gender, meskipun sebenarnya ia sangat berpeluang dijadikan media untuk memutuskan ketimpangan gender. Lebih tragis lagi banyak praktisi pendidikan tidak menyadari bahwa materi-materi pendidikan yang disosialisasikan berdasarkan teks pendidikan kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar yang “seksis” adalah hasil dari serangkaian pertentangan gender yang bergemuruh dalam masyarakat. Sementara di sisi lain pendidikan menjustificasinya sebagai sebuah kebenaran etika. Lihat, Lea P. Stewart, et al, *Communication and Gender*, (Boston: Allyn and Bacon, 2003), 131-154. Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), 4-23.

3. Bias gender sangat mudah didapati yaitu selain ditemukan pada bahan ajar agama Islam PTN dan PTS di Yogyakarta, model pengajarannya pun juga masih bias gender. Itulah mengapa, pengarusutamaan gender terhadap bahan ajar yang ada pada PTN dan PTS di Yogyakarta belum terlihat atau sekalipun ada hanyalah terhitung pada pola pengajaran yang diampu oleh mereka yang paham struktural orintasi gender. Ketidakberanian dari seorang pengampu bahan ajar mata kuliah agama untuk memberikan penjelasan baru terkait dengan adanya teks keagamaan yang bias gender menjadi faktor utama bias jender dalam sistem pengajaran di PTN dan PTS di Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Zulkarnaini. *Mengapa Harus Perempuan?*, AR-RUZZ. Yogyakarta: 2003.
- Al-Syaibani, Omar Mohammad Al-Thoumi. *Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung. Jakarta; PT. Bulan Bintang. 1979.
- Brannon, Linda. *Gender: Psychological Perspective*, Boston: Allyn and Bacon, 1999.
- Data Sensus Penduduk Tahun 2000.
- Faqih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998.
- <http://www.paramadina.com>.
- M. Lips, Hilary. *Sex and Gender: An Introduction*. California: Mayfield Publishing Company, 2001.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Mernissi, Fatimah. *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka, 1994.
- Mulia, Musdah. (ed.) *Keadilan dan Kesetaraan Jender; Perspektif Islam*. Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama, Departemen Agama, 2001.
- Stewart, Lea P., et all. *Communication and Gender*. Boston: Allyn and Bacon, 2003.
- Sumber Data Statistik dan Indikator Gender Indonesia 2002.
- Suryadilaga, M. Alfatih. dkk. *Gender Mainstreaming dalam Kurikulum Matakuliah Agama Islam di PTN dan PTS di Yogyakarta*. Penelitian Dosen Muda, Dirjend Dikti Diknas, tp, 2007.
- Tim KKG PAI. *Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan Agama Islam untuk SD kelas 4*. Jakarta ; Ghalia Indonesia, 2002.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender*. Jakarta: Paramadina, 2001.